



RENCANA AKSI ATAS PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BP4D)**

TAHUN 2020

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

Jl. Dewi Sartika No. 2 Subang

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan Rahmat dan KaruniaNya dapat menyusun Rencana Aksi Atas Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perubahan Perjanjian Kinerja ini secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2021.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga dapat tersusunnya Rencana Aksi Atas Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.

KEPALA BP4D KABUPATEN SUBANG

HARI RUBIYANTO, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19840111 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BP4D	3
1.3 Tujuan Rencana Aksi Atas Perubahan Perjanjian Kinerja	11
BAB II PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	12
2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama	13
BAB III PENUTUP	14
Lampiran Rencana Aksi atas Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai batasan waktu yang telah ditentukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang sebagai komitmen pemerintah daerah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai tujuan pada Visi dan Misi Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BP4D

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) merupakan penyelenggara pemerintahan daerah yang mengemban tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Subang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati
3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

Adapun susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan, yang mempunyai tugas merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan badan dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan, penetapan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
 - b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
 - c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
 - d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan
 - e. Pembinaan pelaksanaan kegiatan lingkup badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
 - f. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Daerah.

2. Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat
- b. Pembinaan pelaksanaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah
- c. Perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan
- d. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian Badan
- e. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan barang daerah
- f. Pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
- g. Perumusan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat
- h. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Badan
- i. Pengelolaan naskah Dinas
- j. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait
- l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, mengumpulkan/ mengolah data, monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang penelitian dan pengembangan
- b. Penyusunan kajian kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan

- c. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
- d. Pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah
- e. Pelaksanaan pengembangan pembangunan daerah
- f. Pemantauan dan pengevaluasian atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
- g. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang penelitian dan pengembangan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan :

- a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - b. Sub Bidang Data dan Pelaporan
 - c. Sub Bidang Litbang
4. Bidang Pendanaan dan Pemerintahan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan Kabupaten Subang dibidang Pendanaan dan Pemerintahan yang meliputi perencanaan alokasi pendanaan pembangunan dan perencanaan pengembangan pendanaan pembangunan serta perencanaan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pendanaan dan Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja dibidang Pendanaan dan Pemerintahan
 - b. Penyusunan kajian kebijakan dibidang Pendanaan dan Pemerintahan dan sistem informasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
 - c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencanaan dibidang Pendanaan dan Pemerintahan
 - d. Pelaksanaan koordinasi evaluasi Pendanaan dan Pemerintahan
 - e. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan
 - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Pendanaan dan Pemerintahan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bidang Pendanaan dan Pemerintahan membawahkan :

- a. Sub Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan
 - c. Sub Bidang Pemerintahan
5. Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melaksanakan, menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi yang meliputi investasi, penyertaan modal, jasa, pariwisata, industri pertanian, ketahanan pangan, energi terbaru dan terbarukan, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang ekonomi
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan perencanaan pembangunan daerah dibidang ekonomi
- c. Penyusunan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi
- d. Penyusunan kajian kebijakan dibidang ekonomi
- e. Pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan pembangunan daerah dibidang investasi, penyertaan modal, jasa, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, pertanian, ketahanan pangan, pertambangan, energi dan dunia usaha
- f. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang ekonomi
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bidang Ekonomi membawahkan :

- a. Sub Bidang Investasi, Jasa dan Pariwisata
 - b. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi
 - c. Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
6. Bidang Sosial Budaya, mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan umum dan program pembangunan daerah dibidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, agama, mental spiritual, pemuda dan olahraga, kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, penanganan bencana, ketenagakerjaan, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang Sosial Budaya
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan perencanaan pembangunan daerah dibidang sosial budaya

- c. Penyusunan rancangan umum, penelitian dan pengembangan dibidang sosial budaya
- d. Penyusunan kajian kebijakan dibidang sosial budaya
- e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dibidang pendidikan, agama mental spiritual
- f. Pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan pembangunan dibidang pemerintahan, penerangan dan komunikasi, kesejahteraan rakyat, kependudukan, social budaya, ketenaga kerjaan, kebencanaan
- g. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang sosial budaya
- h. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bidang Sosial Budaya membawahkan :

- a. Sub Bidang Kependudukan dan Komunikasi
 - b. Sub Bidang Pendidikan Olahraga dan Kebudayaan
 - c. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
7. Bidang Prasarana dan Tata Ruang, mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan umum dan program pembangunan daerah dibidang prasarana dan tata ruang yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya, perhubungan, tata ruang, energi, lingkungan hidup, kebersihan, infrastruktur pendukung rekonstruksi dan rehabilitasi bencana serta perumahan dan permukiman.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Prasarana dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang prasarana dan tata ruang
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) program penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang prasarana dan tata ruang
- c. Penyusunan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan dibidang prasarana dan tata ruang

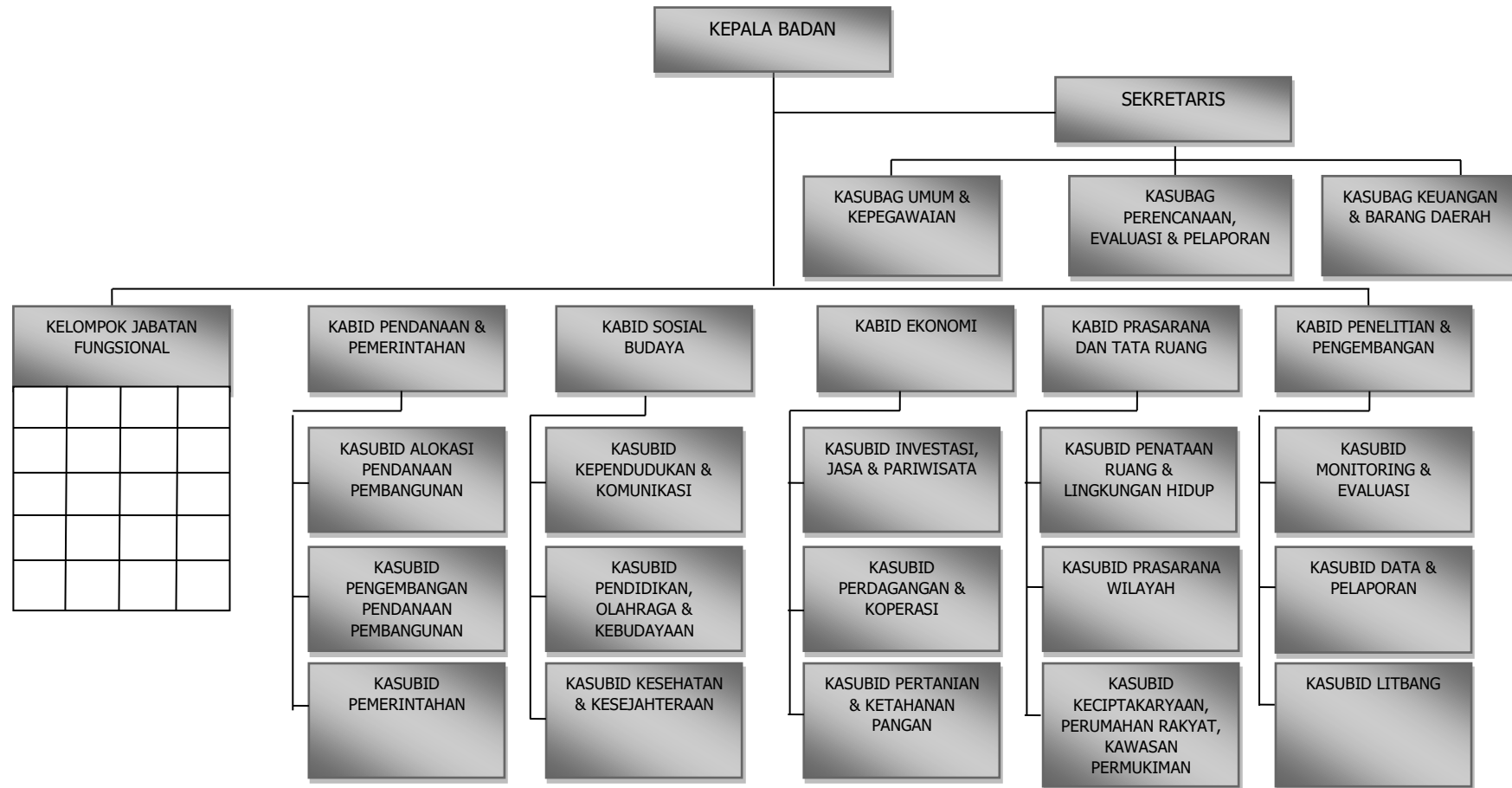
- d. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang bina marga, pengairan, cipta karya, perhubungan, tata ruang, energi, lingkungan hidup, kebersihan, infrastruktur pendukung rekonstruksi dan rehabilitasi bencana serta perumahan dan permukiman
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang prasarana dan tata ruang
- f. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
- h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang prasarana dan tata ruang
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bidang Prasarana dan Tata Ruang membawahkan :

- a. Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
 - b. Sub Bidang Prasarana Wilayah
 - c. Sub Bidang Keciaptakaryaan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
8. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan badan secara professional sesuai dengan kebutuhan.

Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BP4D Kabupaten Subang



1.3 TUJUAN RENCANA AKSI ATAS PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*Outcome*). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Intensifikasi dalam upaya pencegahan Korupsi
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparasi, dan Kinerja aparatur pemerintahan
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c. Sebagai dasar dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d. Tolak ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e. Sebagai dasar pemberian atau penghargaan dan sanksi.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Subang yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan pada pelaksanaan misi ke-1 “Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terbuka serta pelayanan masyarakat” dengan arah kebijakan yaitu Menyempurnakan sistem perencanaan pembangunan terpadu melalui e-planning dan ebudgeting guna tercipta pembangunan yang partisipatif dan terbuka. Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan, maka tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang adalah :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas
2. Terwujudnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan

Dan Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sinerjik dan berkelanjutan. Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana aksi atas perjanjian kinerja). Adapun sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang yaitu :

1. Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
3. Meningkatnya pencapaian target-target pembangunan
4. Meningkatnya perencanaan kegiatan yang bersumber dari dana CSR
5. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
6. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan.

2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja dalam dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang menggunakan indikator kinerja tingkat hasil (*Outcome*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan secara keseluruhan. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja Tahun 2021 sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Aksi Atas Perubahan Perjanjian Kinerja).

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Atas Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang ini merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang. Dengan demikian rencana aksi atas perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja penilaian terhadap pejabat tersebut. Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja, dengan memacu bawahan untuk lebih meningkatkan kinerjanya kepada atasan dan kepada masyarakat. Demikian kami sampaikan Rencana Aksi Atas Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2021

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				JUMLAH	KEGIATAN	OUTPUT				JUMLAH	CAPAIAN KINERJA (%)	PENANGGUNGJAWAB	ANGGARAN
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV			TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV				
1	2	4		5	6	7	8	9=(5+6+7+8)	10	11	12	13	14	15=(11+12+13+14)	16=(15/9)*100%		17
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																11.161.963.969
	PERENCANAAN																11.060.224.469
1.	Terwujudnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	Nilai Evaluasi AKIP BP4D															10.317.656.969
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D															
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	Nilai Evaluasi AKIP BP4D															10.317.656.969
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persen														10.257.036.219
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Jenis								5						34.174.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	buku	10	10	10	40	70	Belanja Cetak Perjanjian Kinerja 10 buku		10		60	96%		BIDANG SEKRETARIAT	10.170.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen	buku	20				20	Belanja Cetak RKA 20 buku		20			100%		BIDANG SEKRETARIAT	2.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen	buku			20		20				20		100%		BIDANG SEKRETARIAT	2.800.000

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	buku	20				20	Belanja Cetak DPA 20 buku		20			100%		BIDANG SEKRETARIAT	2.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	buku			20		20				20		100%		BIDANG SEKRETARIAT	2.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	buku	30	10	10	10	60	Belanja Cetak Laporan Monev Triwulan I 10 buku, Cetak LKPJ 10 buku, Cetak LPPD 10 buku	20	10		30	100%		BIDANG SEKRETARIAT	7.104.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	buku	10			10	20	Belanja Cetak LKIP 10 buku		10			100%		BIDANG SEKRETARIAT	5.700.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan administrasi keuangan	Jenis														8.397.187.474
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	66	66	66	66	264	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	66	66	66	66	96%		BIDANG SEKRETARIAT	8.379.187.474
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun	buku				78	78					78	33%		BIDANG SEKRETARIAT	10.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah buku laporan keuangan bulan/ triwulan/ semesteran	buku		78			78	Belanja Cetak Buku Besar 14 buku, Buku Jurnal umum 8 buku, Buku Laporan Keuangan Semesteran 14 buku, Buku Laporan Pengguna Barang Milik Daerah Semesteran 14 buku, Buku Laporan Persediaan 28 buku			78		200%		BIDANG SEKRETARIAT	8.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan administrasi kepegawaian	jenis														29.325.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis pengadaan pakaian dinas	jenis			1	1	2				1	1	100%		BIDANG SEKRETARIAT	24.825.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	orang			1		1			1			1		BIDANG SEKRETARIAT	4.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan administrasi umum	jenis											0			931.469.820
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik	jenis	3	3	5	4	15	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik		5	2		80%		BIDANG SEKRETARIAT	18.500.000

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan alat tulis kantor	jenis	1	44			45	Belanja Alat Tulis Kantor		45			98%		BIDANG SEKRETARIAT	198.959.820
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis penyediaan peralatan rumah tangga	jenis	7	14	6	10	37	Belanja Bahan-bahan Bangunan dan kontruksi, Belanja Bahan Isi Tabung Gas, Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		15	9	3	78%		BIDANG SEKRETARIAT	20.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	dus	1260	3000	3000	1000	8260	Belanja makanan dan minuman rapat		2078	30	6134	8242		BIDANG SEKRETARIAT	205.855.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jenis		21			21	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak, Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Souvenir/ Cindera Mata				9	67%		BIDANG SEKRETARIAT	68.725.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis			1	1	2	Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film dan Pemotretan, Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah				2	100%		BIDANG SEKRETARIAT	35.700.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	dus	154	100	138	473	865	Belanja makanan dan minuman tamu		323		170	57%		BIDANG SEKRETARIAT	32.275.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan	kali		100	343		443	Belanja perjalanan dinas dalam kota, Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota		62	339		89%		BIDANG SEKRETARIAT	351.455.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	jenis					0						0			209.774.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	unit	37				37	Belanja Alat penghancur kertas 1 unit, Portable projector 1 unit, AC i unit, PC All in one 1 unit, Software PC Mac Student 1 unit, Laptop 4 unit, External/ Portable Hardisk 3 buah, Logitech speaker 2 unit, mouse wireless 11 buah, Ponter Presentasi 3 buah, Printer 3 unit, SSD 2 unit, Webcam Logitech 1 unit			34	3	97%		BIDANG SEKRETARIAT	199.464.000

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	unit				3	3	Belanja Filling cabinet besi 2 unit, Meja pingpong/ tenis meja 1 unit			3		100%		BIDANG SEKRETARIAT	10.310.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	jenis					0						0			518.915.925
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah buku laporan E-Disposisi	buku				20	20	Belanja buku laporan E-Disposisi			20		100%		BIDANG SEKRETARIAT	33.454.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telp dan internet	rekening	3				3	Belanja pembayaran rekening listrik, telp dan internet				3	100%		BIDANG SEKRETARIAT	316.661.925
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	2	1	1		4	Belanja pemeliharaan AC, pemeliharaan komputer/ PC/ Laptop, pemeliharaan printer		2			100%		BIDANG SEKRETARIAT	62.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas pelayanan umum kantor	orang	7	7	7	7	28	Belanja jasa kebersihan kantor 5 orang, jasa keamanan kantor 2 orang	7	7	7	7	100%		BIDANG SEKRETARIAT	106.800.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	jenis											0			136.190.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	unit	4	2	12	7	25	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Dua			25		84%		BIDANG SEKRETARIAT	53.680.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang mendapatkan pemeliharaan	unit	6	9	11	7	33	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Dua, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Tiga			33		79%		BIDANG SEKRETARIAT	39.510.000

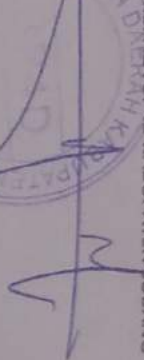
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	M²		100	70		170			28		140	69%		BIDANG SEKRETARIAT	43.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota												0			60.620.750
	Penataan Organisasi	Jumlah kegiatan penataan organisasi	kegiatan											0			60.620.750
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen	buku	195				195	Belanja Cetak Draft LAKIP 40 buku, Buku LAKIP 35 buku, Materi Pendampingan SAKIP 40 buku		10	105	80	99%		BIDANG SEKRETARIAT	60.620.750
	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	Persentase target kinerja Bupati yang tercapai	Persen											0			742.567.500
	Meningkatnya pencapaian target-target pembangunan	Persentase target kinerja Bupati yang tercapai	Persen											0			742.567.500
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	Persen											0			393.480.750
		Persentase kegiatan yang terealisasi	Persen											0			42.605.750
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah jenis kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan												0			370.188.750
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah buku laporan			10	110	40	160	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		10	110	40	99%		BIDANG PENDANAAN DAN PEMERINTAHAN	55.214.000
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	Jumlah buku laporan		25				25	Belanja Cetak Buku Hasil Forum Perangkat Daerah 25 buku		25			100%		BIDANG PENDANAAN DAN PEMERINTAHAN	11.979.500
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah buku laporan		50				50	Belanja Cetak Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten, Belanja Cetak Spanduk, Belanja Honorarium Narasumber, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		25		25	94%		BIDANG PENDANAAN DAN PEMERINTAHAN	131.078.000

	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah buku laporan		90				90	Belanja Cetak Bahan Musrenbang Kecamatan 3 buku, Hasil Rekap Musrenbang Kecamatan 25 buku		55		35	88%		BIDANG PENDANAAN DAN PEMERINTAHAN	11.951.250
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis dokumen	jenis	4	7	2	1	14	Belanja Cetak Buku Rancangan RKPD Tahun 2022 17 buku, Buku Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022, Buku Rancangan Awal RPJMD Tahun 2018-2023, Belanja Honorarium TAPD		3		7	57%		BIDANG PENDANAAN DAN PEMERINTAHAN	159.966.000
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Jenis				2	2						0			23.292.000
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah buku laporan Sistem Informasi Pembangunan Daerah					25	25						0		BIDANG LITBANG	6.575.000
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah buku profil daerah					80	80						0		BIDANG LITBANG	16.717.000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	Jumlah kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang					1	1						64%			42.605.750
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah buku laporan hasil pengendalian dan evaluasi		25	55	25	55	160	Belanja Cetak Laporan Monev Triwulan I 25 buku, Laporan Monev Triwulan II 25 buku, Laporan Kinerja Semester I 30 Buku		25	55	80	64%		BIDANG LITBANG	42.605.750
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program Renja OPD terhadap RKPD												0			306.481.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah jenis kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia												0			33.598.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah kegiatan rakor perencanaan bidang pendanaan dan pemerintahan					2	2						0		BIDANG SOSBUD	1.335.750

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah kegiatan rakor perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia				2	2	4			1		2	50%		BIDANG SOSBUD	32.262.250
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					1	1			1			100%			70.192.500
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah kegiatan rakor perencanaan pembangunan bidang perekonomian				2	1	3			1			33%		BIDANG EKONOMI	70.192.500
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah jenis kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					2	2						0			202.690.500
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah kegiatan rakor perencanaan pembangunan bidang infrastruktur				5	1	6				5	1	100%		BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	22.130.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah kegiatan rakor perencanaan pembangunan bidang kewilayahan				2		2					2	100%		BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	180.560.500
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH													0			101.739.500
	Terwujudnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Skor											0			
	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Skor											0			101.739.500
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Kajian				5							0			101.739.500

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Kegiatan								1				1			BIDANG LITBANG	101.739.500
fasilitasi, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan rapat sosialisasi penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	kegiatan	2	1				3		1			1	100%			BIDANG LITBANG	101.739.500

KEPALA BPAD KABUPATEN SUBANG



HARI RUBIYANTO, S.STP., M.Si
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19840111 200212 1 001